

**ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN  
KAS BELANJA LANGSUNG (LS) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
DI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh :**

**CHERLY KURNIA WANGI**

**NPM. 18.01.12.00.21**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

**2022**

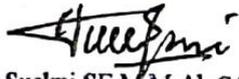
**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : CHERLY KURNIA WANGI  
Nomor Pokok/NIM : 18.01.12.00.21  
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR  
AKUNTANSI PENGELUARAN KAS  
BELANJA LANGSUNG (LS) DAN BELANJA  
TIDAK LANGSUNG DI DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembimbing Skripsi

Tanggal 23-09-2022 Pembimbing I :   
: Yancik Syafitri, SE.M.Si  
NIDN.0225026401

Tanggal 23-09-2022 Pembimbing II :   
: Titi Suelmi SE.M.M.Ak.CA  
NIDN.0025075701

Dekan Fakultas Ekonomi

Tanggal.....



Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS  
NIDN.0205026401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Tanggal.....



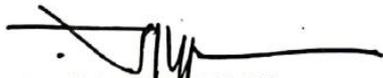
Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS  
NIDN.0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : CHERLY KURNIA WANGI  
Nomor Pokok/NIM : 18.01.12.00.21  
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR  
AKUNTANSI PENNGELUARAN KAS  
BELANJA LANGSUNG (LS) DAN  
BELANJA TIDAK LANGSUNG DI DINAS  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penguji Skripsi :

Tanggal 20-10-2022 Ketua Penguji :   
Yancik Syafitri, SE.M.Si  
NIDN.0225026401

Tanggal 20-10-2022 Penguji I :   
Titi Suelmi, SE.M.M.Ak,CA  
NIDN.0025075701

Tanggal 20-10-2022 Penguji II :   
Pipit Fitri Rahayu, SE.,M.Si  
NIDN. 0210049001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi

Tanggal.....



Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS  
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi

Tanggal.....



Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS  
NIDN.0205056701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

"Tetapkan tujuan, tentang diri anda dan capai tujuan tersebut. Ciptakan pola hidup yang sehat dan teruslah menghitung setiap waktu yang anda miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan dan focus pada hal yang positif."

### **Kupersembahkan kepada :**

1. Allah Swt atas Rahmat yang diberikan
2. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Mama dan papa yang menjadi motivasi ku dan yang selalu setia dengan do'a untuk anaknya
3. Saudaraku tersayang
4. Sahabat serta teman seperjuangan semasa kuliah
5. Dosen Universitas Tridinanti Palembang
6. Almamaterku

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cherly Kurnia Wangi

Nomor Pokok : 18.01.12.00.21

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menjiplak karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dalam keadaan sadar.

Palembang, Agustus 2022



Cherly Kurnia Wangi

## KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kepada Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung (ls) dan Belanja Tidak Langsung Di Dinas Pengelolaan Sumber Daya ”**

Skripsi ini disusun penulis dengan tugas dan kewajiban guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Universitas Tridianti Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan, dan semangat dari semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, MP selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Palembang.
4. Bapak Yancik Syafitri,SE.M.Si selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas bimbingannya, mulai dari waktu, motivasi, kritik, saran dan semua yang telah Bapak berikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu Titi Suelmi, SE,M.M,Ak,CA selaku Dosen pembimbing II untuk tugas akhir penulis ucapkan Terima kasih atas bimbingan, mulai dari waktu, motivasi, kritik, saran dan semua yang telah ibu ajarkan sampai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Shelly Farida Tobing, SE, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah membantu demi pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Pimpinan serta staff Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam mendapatkan data-data guna penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Kedua orang tuaku yang aku cintai Ayahanda Nawawi Natty Harnendy dan Ibunda (alm) yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang juga berjuang dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Pihak-pihak yang tidak disebutkan di dalam kesempatan ini, terima kasih atas segala bantuan moril maupun materil.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk karya yang lebih baik lagi. Semoga karya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Palembang,      Agustus 2022  
Penulis,

Cherly Kurnia wangi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Teori .....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.1.2 Konsep Belanja Langsung.....	18
2.1.3 Konsep Belanja Tidak Langsung.....	19
2.1.4 Sistem Akuntansi Sektor Publik.....	24
2.1.5 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.....	25
2.2 Penelitian yang Relevan .....	30
2.3 Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.1.1 Tempat Penelitian .....	37
3.1.2 Waktu Penelitian .....	37
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.2.1 Sumber Data .....	37
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.3 Rancangan Penelitian .....	39
3.4 Variabel dan Definisi Operasional .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	42
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel .....	42
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel .....	44
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel.....	44

4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja .....	46
4.1.5 Pengeluaran Kas .....	53
4.1.6 Dokumen yang digunakan .....	53
4.2 Data Belanja Langsung (ls) dan Belanja Tidak Langsung .....	59
4.2.1 Penerapan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung (ls) .....	59
4.2.2 Penerapan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Tidak Langsung.....	60
4.3 Pembahasan .....	62
4.3.1 Belanja Langsung (ls) .....	62
4.3.2 Belanja Tidak Langsung .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
Daftar Pustaka .....	65

## DAFTAR TABEL

**Halaman**

**Tabel :**

2.1	Perbedaan Belanja Langsung (ls) dan Belanja Tidak Langsung	22
2.2	Penelitian yang Relevan.....	32
3.1	Variabel dan Definisi Operasional.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar:

1.1	Prosedur Akuntansi Kas Belanja Langsung (ls) dan Belanja Tidak Langsung .....	7
2.1	Model Kerangka Pemikiran Teoritis.....	36
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov Sumsel .....	47
4.3	Contoh Surat Perintah Pembayaran.....	55
4.4	Contoh Surat Pengantar .....	56
4.5	Contoh Surat Perintah Pencairan Dana .....	57

## **ABSTRAK**

**CHERLY KURNIA WANGI. Analisis Penerapan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung (ls) dan Belanja Tidak Langsung di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Dibawah Bimbingan Bapak Yancik Syafitri, SE.,M.Si dan Ibu Titi Suelmi, SE.,M.M,Ak,CA )**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Akuntansi pengeluaran kas belanja langsung (ls) dan belanja tidak langsung di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) berjalan dengan baik namun terkendala di waktu, karena menunggu keluarnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Gubernur Sumatera Selatan. dengan demikian keterlambatan proses pengeluaran kas belanja langsung (ls) dan belanja tidak langsung di Dinas pengelolaan sumber daya air Provinsi sumatera selatan.

**Kata Kunci : Prosedur Akuntansi, Pengeluaran Kas**

## **ABSTRACT**

**CHERLY KURNIA WANGI. Analysis of the Application of Accounting Procedures for Direct Cash Expenditures (ls) and Indirect Expenditures at the Water Resources Management Office of South Sumatra Province (Under the Guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE., M.Si and Mrs. Titi Suelmi, SE., M.M, Ak, CA)**

*The purpose of this study was to determine and analyze the accounting procedures for direct cash expenditures (ls) and indirect expenditures at the Water Resources Management Office of South Sumatra Province. The data sources of this research were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were documentation, observation, and interviews. The analytical technique used is qualitative and quantitative analysis.*

*The result of this research is that the SOP (Standard Operating Procedure) runs well but is constrained by time, because it is waiting for the issuance of the SP2D (Warrant for Disbursement of Funds) from the Governor of South Sumatra. thus the delay in the process of cash disbursement of direct expenditure (ls) and indirect expenditure at the Water Resources Management Office of South Sumatra Province.*

**Keywords: Accounting Procedures, Cash Disbursements**

## **RIWAYAT HIDUP**

Cherly Kurnia Wangi, dilahirkan di Palembang pada tanggal 29 Desember 2000 merupakan Anak Kedua dari Ayah Nawawi Natty Harnendy dan Ibu Anita (almh).

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SDN Negeri 149 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2015 di SMPN 40 Palembang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2018 di SMA Negeri 13 Palembang, pada tahun 2018 ia memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Agustus 2022

Cherly Kurnia Wangi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diwujudkan dengan keterbukaan pemerintah di dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini nampak dari terbitnya berbagai macam perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis selalu menuntut untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana anggaran publik tersebut telah dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa anggaran tersebut telah dibelanjakan secara *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif).

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan sistem akuntansi yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan merumuskan dan mengembangkan standar akuntansi pemerintahan sebagai manfaat sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, selanjutnya selama anggaran berlangsung dibutuhkan prosedur yang sesuai dengan dokumen-dokumen yang ditentukan diakuntabilitaskan sebagai

bentuk pertanggung jawaban keuangan daerah selama satu tahun periode. Anggaran belanja daerah (APBD) atau disebut juga dengan belanja daerah atau belanja pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja dikategorikan dalam dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung (LS) adalah jenis belanja yang dilakukan oleh satuan kerja yang dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah/negara kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Pemerintah telah merancang sistem akuntansi tentang prosedur pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengeluarkan peraturan Menteri keuangan No. 190/PMK.06/2005 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan belanja tidak langsung, ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan dari peraturan ini agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dinas pekerjaan umum pengairan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan peraturan gubernur No. 44 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas pengelolaan sumber daya air provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas yang bekerja di bidang pengairan. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang diusahakan oleh manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang perairan.

Pemerintah maupun perusahaan swasta memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang atau kesempatan yang ada, mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan tepat, dengan semakin berkembangnya suatu instansi pemerintah, maka fungsi penerapan prosedur akuntansi pada pengeluaran kas di suatu instansi dimungkinkan kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena jangkauan yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan dirasakan sangat terbatas. Untuk itu, manajemen memerlukan suatu alat bantu yang dapat membantu dalam meningkatkan fungsi penerapan prosedur. Dengan demikian pemerintahan yang baik akan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya karakteristik tata kelola yang baik. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) bahwa pemerintahan yang baik adalah praktek kewenangan pelaksana untuk mengatur urusan pemerintahan nasional tingkat politik, ekonomi dan administrasi. Pemerintah daerah yang unit kerjanya merupakan unit akuntansi wajib melakukan pencatatan transaksi di lingkungan kerjanya. Satuan kerja tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran atau pengguna asset yang juga melakukan pengelolaan. Satuan kerja dinas teknis pengelolaan pendapatan daerah adalah kelompok kerja kanwil atau SKPD. Prosedur akuntansi belanja pada SKPD mencakup biaya pegawai, biaya barang dan jasa, dan biaya modal.

Untuk lebih memperkuat akuntabilitas dan mencegah penipuan dan pemborosan milik negara dalam segala bentuknya, pemerintah telah menetapkan prosedur terlebih dahulu dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

terkait sebagai contoh, pada tahun 2006, peraturan No. 13 kementerian administrasi pemerintahan dan dalam negeri memberlakukan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan baik setoran maupun penarikan tunai digunakan sebagai pedoman utama pengelolaan keuangan.

Prosedur akuntansi SKPD mencakup berbagai proses mulai dari pencatatan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja perangkat daerah merupakan satuan kerja akuntansi yang wajib mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di suatu lingkungan kerja. Saat melaksanakan tindakan pemerintah, belanja merupakan alat penting untuk mendukung pelaksanaan Tindakan pemerintah, belanja merupakan alat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja perangkat daerah merupakan satuan kerja akuntansi yang wajib mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di suatu lingkungan kerja. Saat melaksanakan tindakan pemerintah, belanja merupakan alat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja perangkat daerah merupakan satuan kerja akuntansi yang wajib mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di suatu lingkungan kerja. Saat melaksanakan Tindakan pemerintah, belanja merupakan alat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas negara/daerah yang mengurangi modal sendiri dana berjalan selama tahun anggaran dan tidak diganti oleh negara.

Kas adalah aset paling mutakhir dan dalam istilah moneter sehari-hari dapat

disamakan dengan uang tunai yang tersedia untuk mata uang fiat. Dengan persediaan kas yang cukup, perusahaan beroperasi dengan baik terutama di bidang pembayaran kas, yang meliputi pembelian barang dan jasa, kepemilikan aset, pembayaran utang, transaksi keuangan, dan aktivitas lainnya.

Salah satu prosedur keuangan daerah adalah sistem pembayaran tunai, yang merupakan rangkaian proses pembayaran tunai secara manual dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pencatatan. Klasifikasi, dan ringkasan transaksi atau peristiwa keuangan yang mengarah pada pelaporan keuangan.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sangatlah penting diterapkan di suatu instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bertujuan untuk mengetahui efektivitas prosedur yang dijalankan dan untuk memudahkan dalam proses pengeluaran kas. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, maka otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah lebih banyak memberikan pelayanan publik berdasarkan prinsip pelayanan publik (termasuk partisipasi dan akuntabilitas).

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sangatlah penting diterapkan di suatu instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bertujuan untuk mengetahui efektivitas prosedur yang di jalankan dan untuk memudahkan dalam proses pengeluaran kas. Jenis pengeluaran kas yang penulis teliti di dinas pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera selatan yaitu mekanisme pembayaran langsung (LS) dan tidak langsung.

Menurut peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 pembayaran langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan

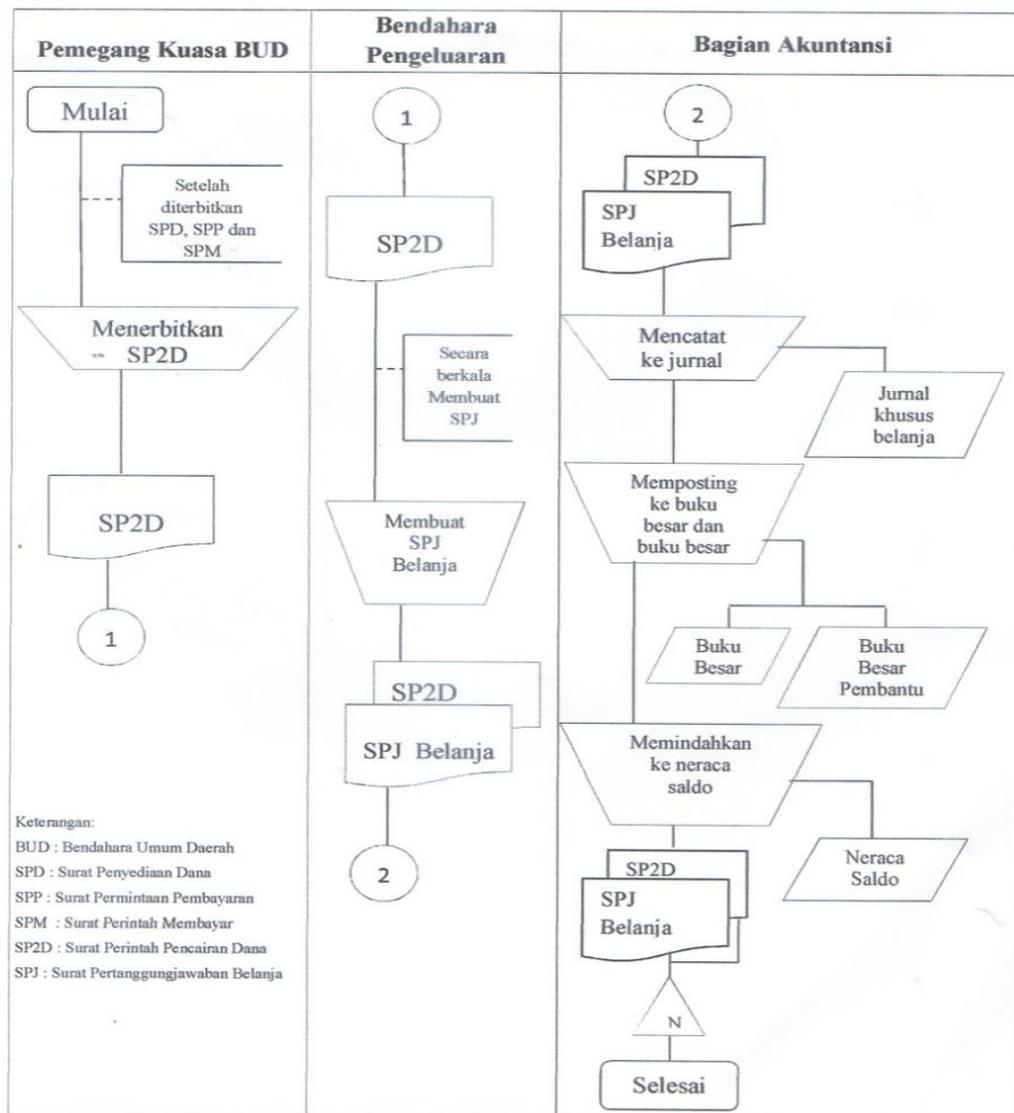
langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social , belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Secara sederhana inti dari penggunaan mekanisme pembayaran langsung (LS) adalah agar pembayaran atas hak tagih kepada negara dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan pembayaran tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Dalam mekanisme langsung (LS) yaitu: pembayaran kontrak pembangunan Gedung, serta pembayaran pengadaan peralatan dan mesin. Pada prinsipnya bendahara tidak terlibat dalam mekanisme pembayaran langsung (LS), tetapi pada prakteknya ada pelaksanaan metode pembayaran langsung yang melalui rekening bendahara. Pada umumnya metode ini disebut dengan LS bendahara. Pada metode ini bendahara harus ikut bertanggung jawab karena sebenarnya pembayarannya bersifat LS tetapi melalui rekening bendahara. Metode LS bendahara pada umumnya digunakan untuk pembayaran kepada PNS atau perorangan non PNS berhubungan dengan adanya kegiatan tertentu.

Berikut ini dapat dilihat prosedur pengeluaran kas belanja langsung dan belanja tidak langsung di dinas pengelolaan sumber daya air provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar 1.1**

**Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung (LS)  
dan Belanja tidak langsung di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Selatan

Berdasarkan prosedur diatas, proses pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung di dinas pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera selatan sangat panjang, sehingga menyebabkan proses tersebut menjadi sangat lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Serta terjadinya perangkapan tugas pada prosedur akuntansi dan pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung. Penulis mencoba menganalisis prosedur akuntansi yang dilaksanakan dinas pengelolaan sumber daya air provinsi sumatera selatan. Tentang pengelolaan keuangan daerah dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG (LS) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN".

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung pada Dinas pengelolaan sumber daya air Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung oleh dinas pengelolaan sumber daya Air provinsi sumatera selatan.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah:

- a. Memperkaya kajian empiris, tentang teori akuntansi sector publik, terutama teori sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung yang dikaitkan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sebagai masukan bagi pihak dinas pengelolaan sumber daya air Provinsi Sumatera Selatan khususnya bagian keuangan yang sangat menentukan bagi tercapainya penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS) dan belanja tidak langsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat pada kajian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Pratama Nst. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan Pada Pemerintah Kota Binjai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 (2), 1-13.  
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/7>
- Biduri, (2018). *Akuntansi sector public*. UMSIDA Press: Sidoarjo
- Eric dkk. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dikota Bitung.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32760>
- Fajar Nur'Aini. (2016) *Pedoman praktis menyusun standard operating procedure*. Quadrant: Yogyakarta
- M B Romney & P J Stainbart. (2018). *Accounting Information System*. Person
- Mulyadi. (2016). *Sitem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Mahmudi. (2016). *Akutansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta
- Martani Dkk (2016). Salemba Empat: Jakarta
- Nurhaida Widiani (2017). *Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Rahmad Mahmud Jullie Sondakh. & Novi S Budiardo. (2016). Analisis Sitem dan Prosedur Pengeluaran Kas. *Jurnal EMBA*, 692-702  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13149>
- Rudianto (2018). *Sifat dan Komposisi kas*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem  
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan